

Analisis Penerapan Basis Akrua pada Biaya yang Masih Harus Dibayar (BYMHD): Evaluasi Menggunakan Metode STAR

Anggraeni Puspita Dewi¹, Dwi Suhartini²

Akuntansi, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 05-07-2026

Revised: 16-07-2026

Accepted: 28-07-2026

Keywords:

Accrual Basis,
Biaya yang Masih Harus
Dibayar (BYMHD),
Pelaporan Keuangan,
perusahaan jasa
kepelabuhan,
STAR.

ABSTRACT

Tujuan Penelitian: Menganalisis penerapan *accrual basis* dalam pengakuan Biaya yang Masih Harus Dibayar (BYMHD) pada PT Pelindo Multi Terminal Branch Jamrud Nilam Mirah. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kompleksitas operasional perusahaan jasa kepelabuhanan yang menyebabkan pekerjaan telah selesai dilaksanakan, tetapi invoice dari vendor belum diterima pada akhir periode pelaporan, sehingga berpotensi menimbulkan kesalahan *cut-off*, risiko *misstatement*, dan penyajian kewajiban yang kurang mencerminkan kondisi keuangan perusahaan.

Metode Penelitian: Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode STAR (*Situation, Task, Action, Result*). Data diperoleh melalui observasi, telaah dokumen akuntansi, dan dokumentasi selama kegiatan magang di PT Pelindo Multi Terminal Branch Jamrud Nilam Mirah. Validitas data dilakukan melalui triangulasi sumber dan metode, sedangkan analisis difokuskan pada identifikasi kondisi operasional, tantangan pengakuan biaya, implementasi pencatatan, serta hasil penerapan *accrual basis* dalam pengakuan BYMHD.

Originalitas/Novelty: Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menerapkan kerangka STAR sebagai *analytical framework* untuk mengevaluasi implementasi pengakuan BYMHD berbasis *accrual basis* pada perusahaan jasa kepelabuhanan, yang tidak hanya menilai proses pencatatan akuntansi tetapi juga mengintegrasikan aspek operasional, pengendalian internal, dan koordinasi lintas fungsi.

Hasil Penelitian: Pengakuan BYMHD dilakukan berdasarkan kontrak, *Purchase Order* (PO), *Surat Perintah Kerja* (SPK), dan laporan progres pekerjaan sebelum invoice diterbitkan, kemudian dicatat melalui jurnal penyesuaian dan diverifikasi kembali setelah invoice diterima. Temuan empiris menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan *accrual basis* ditentukan oleh sistem informasi akuntansi dan koordinasi antara bagian operasional dan *accounting* serta mekanisme verifikasi dokumen yang mampu meningkatkan ketepatan proses *cut-off*, meminimalkan risiko *misstatement*, dan meningkatkan kualitas penyajian laporan keuangan.

Implikasi: Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur akuntansi mengenai pengakuan kewajiban berbasis akrual pada perusahaan jasa kepelabuhanan serta memberikan rekomendasi praktis bagi perusahaan untuk memperkuat pengendalian internal, mengoptimalkan digitalisasi dokumen pendukung, meningkatkan kualitas pelaporan keuangan, dan mendukung pengambilan keputusan manajerial.

Research Objectives: This study aims to analyze the implementation of the *accrual basis* in recognizing Accrued Expenses (BYMHD) at PT Pelindo Multi Terminal Branch Jamrud Nilam Mirah. The study is motivated by the operational complexity of port service companies, where services are often completed before vendor invoices are received at the end of the reporting period, potentially leading to cut-off errors, financial misstatements, and inaccurate liability recognition.

Research Method: A qualitative approach was employed using the STAR (*Situation, Task, Action, Result*) analytical framework. Data were collected through direct observation, accounting document reviews, and documentation during the internship period. Data validity was ensured through source and method triangulation, while the analysis focused on operational conditions, challenges in expense recognition, implementation of accounting procedures, and the outcomes of applying the *accrual basis* in recognizing accrued expenses.

Originality/Novelty: This study introduces the STAR framework as an analytical framework for evaluating the implementation of accrued expense recognition under the *accrual basis* in port service companies by integrating accounting practices with operational activities, internal control mechanisms, and cross-functional coordination.

Research Results: The findings reveal that accrued expenses are recognized based on contracts, *Purchase Orders* (PO), *Work Orders* (SPK), and work progress reports before vendor invoices are issued, followed by adjusting journal entries and subsequent reconciliation once the invoices are received. The empirical findings indicate that successful implementation of the *accrual basis* depends not only on the accounting information system but also on effective coordination between operational and accounting departments and document verification procedures, which improve cut-off accuracy, reduce the risk of financial misstatements, and enhance the quality of financial reporting.

Implications: This study contributes to the accounting literature on *accrual-based liability* recognition in port service companies and provides practical recommendations for strengthening internal controls, optimizing digital document management, improving financial reporting quality, and supporting managerial decision-making.

Copyright © by Author(s)



This is an open-access article under the [CC BY-SA](#) license

Corresponding Author:

Anggraeni Puspita Dewi,

Program Studi Akuntansi, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

Jalan Raya Rungkut Madya No. 1, Gunung Anyar, Surabaya

23013010044@studentupnjatim.id

Pendahuluan

Penyusunan laporan keuangan berbasis akrual merupakan salah satu prinsip fundamental dalam akuntansi modern karena mampu menyajikan posisi keuangan dan kinerja perusahaan secara lebih representatif dibandingkan basis kas. Melalui *accrual basis*, pendapatan dan beban diakui pada saat hak dan kewajiban ekonomi terjadi, bukan ketika kas diterima atau dibayarkan, sehingga laporan keuangan mampu memenuhi prinsip *matching* antara pendapatan dan beban serta menghasilkan informasi yang lebih relevan bagi pengambilan keputusan ekonomi. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang telah mengadopsi *International Financial Reporting Standards* (IFRS) juga menempatkan basis akrual sebagai dasar utama dalam penyusunan laporan keuangan entitas bisnis (IASB, 2018; IAI, 2024). Meskipun demikian, implementasi basis akrual dalam praktik tidak selalu berjalan tanpa kendala, terutama pada pengakuan kewajiban yang masih harus dibayar (Biaya yang Masih Harus Dibayar/BYMHD) yang memerlukan estimasi, pertimbangan profesional, serta ketepatan waktu pengakuan.

Dalam perusahaan jasa kepelabuhanan, pengakuan BYMHD memiliki tingkat kompleksitas yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan manufaktur maupun perdagangan. Aktivitas operasional pelabuhan melibatkan banyak vendor eksternal seperti penyedia jasa bongkar muat, tenaga kerja bongkar muat (TKBM), penyewaan alat berat, utilitas, jasa pemeliharaan, hingga pelayanan kapal yang sering kali telah selesai dilaksanakan sebelum invoice resmi diterbitkan. Kondisi tersebut menyebabkan perusahaan menghadapi risiko keterlambatan penerimaan invoice, kesalahan *cut-off* akhir periode, *understatement* beban operasional, *overstatement* laba, serta penyajian kewajiban jangka pendek yang kurang mencerminkan kondisi ekonomi sebenarnya apabila pengakuan BYMHD tidak dilakukan secara tepat. Fenomena tersebut juga dijumpai pada PT Pelindo Multi Terminal Branch Jamrud Nilam Mirah sebagai perusahaan yang bergerak pada jasa kepelabuhanan *multipurpose*. Karakteristik operasional perusahaan yang melayani bongkar muat curah kering, curah cair, *general cargo*, dan petikemas skala terbatas menyebabkan banyak transaksi jasa pihak ketiga selesai pada akhir periode pelaporan sementara dokumen penagihan masih berada dalam proses administrasi vendor. Kondisi tersebut menuntut bagian keuangan melakukan estimasi BYMHD berdasarkan kontrak, surat perintah kerja (SPK), progress pekerjaan, serta bukti operasional lainnya agar laporan keuangan tetap memenuhi prinsip *accrual basis* dan *matching principle*.

Penelitian mengenai implementasi *accrual basis* telah dilakukan oleh Putra (2021) yang menunjukkan bahwa penerapan basis akrual mampu meningkatkan transparansi fiskal dan kualitas pelaporan keuangan sektor publik. Penelitian Nugraha dan Dwiana (2023) membahas implementasi sistem informasi akuntansi berbasis *accrual* menggunakan Odoo dan menemukan bahwa digitalisasi mampu meningkatkan efisiensi pencatatan transaksi. Saraswati (2025) menjelaskan bahwa basis akrual meningkatkan transparansi informasi keuangan perusahaan jasa. Sementara itu, Nurhayati et al. (2025) lebih menekankan pada kesesuaian pengakuan pendapatan dan beban berdasarkan PSAK. Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut masih berfokus pada implementasi *accrual basis* secara umum dan belum secara khusus mengkaji mekanisme pengakuan Biaya yang Masih Harus Dibayar (BYMHD) pada perusahaan jasa kepelabuhanan yang memiliki kompleksitas transaksi tinggi, terutama berkaitan dengan keterlambatan invoice vendor, estimasi *accrued expenses*, dan proses *cut-off* akhir periode.

Penelitian ini menawarkan kebaruan yaitu memfokuskan analisis pada pengakuan BYMHD sebagai salah satu akun yang paling rentan terhadap risiko salah saji dalam perusahaan jasa kepelabuhanan. Urgensi penelitian ini menggunakan Metode STAR (*Situation, Task, Action, Result*) bukan karena hanya sebagai metode akuntansi, melainkan juga sebagai *analytical framework* untuk mengevaluasi hubungan antara kondisi operasional, tantangan pengakuan biaya, tindakan pengendalian akuntansi,

dan hasil implementasi *accrual basis*. Oleh sebab itu, hasil penelitian mampu memberikan gambaran yang lebih sistematis mengenai proses pengakuan BYMHD dibandingkan penelitian terdahulu yang umumnya hanya mendeskripsikan penerapan basis akrual. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai implementasi *accrual basis* khususnya pada pengakuan *accrued expenses* di sektor jasa kepelabuhanan yang hingga saat ini masih relatif terbatas. Selain itu, hasil penelitian diharapkan menjadi masukan bagi PT Pelindo Multi Terminal maupun perusahaan kepelabuhanan lainnya dalam meningkatkan kualitas proses *cut-off*, estimasi BYMHD, kepatuhan terhadap PSAK, serta penyusunan laporan keuangan yang lebih andal.

Beberapa studi telah membahas penerapan *accrual basis* terhadap kualitas laporan keuangan, sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek kepatuhan terhadap standar akuntansi atau implementasi sistem informasi akuntansi. Beberapa penelitian sebelumnya belum banyak mengevaluasi secara sistematis bagaimana kondisi operasional, tantangan implementasi, tindakan pengendalian, dan hasil penerapan pengakuan BYMHD saling berhubungan dalam perusahaan jasa kepelabuhanan. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan metode STAR (**Situation, Task, Action, Result**) sebagai *analytical framework* untuk mengevaluasi implementasi pengakuan BYMHD secara komprehensif. Kerangka STAR dipilih karena mampu menghubungkan kondisi operasional (*situation*), tantangan pengakuan biaya (*task*), tindakan yang dilakukan perusahaan (*action*), serta hasil implementasinya (*result*), sehingga memberikan gambaran yang lebih sistematis mengenai efektivitas penerapan *accrual basis* dalam mendukung kualitas pelaporan keuangan dan pengendalian internal.

Rumusan masalah penelitian ini yaitu 1) Bagaimana implementasi pengakuan Biaya yang Masih Harus Dibayar (BYMHD) berdasarkan prinsip *accrual basis* pada PT Pelindo Multi Terminal Branch Jamrud Nilam Mirah dan 2) Bagaimana metode STAR mampu mengevaluasi kondisi operasional, tantangan, tindakan pengendalian, dan hasil implementasi pengakuan BYMHD dalam mendukung kualitas pelaporan keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pengakuan Biaya yang Masih Harus Dibayar (BYMHD) berdasarkan prinsip *accrual basis* pada PT Pelindo Multi Terminal Branch Jamrud Nilam Mirah serta mengevaluasi proses tersebut menggunakan metode STAR (*Situation, Task, Action, Result*) guna menjelaskan keterkaitan antara kondisi operasional, tantangan pengakuan biaya, tindakan pengendalian akuntansi, dan hasil implementasinya terhadap kualitas laporan keuangan.

Landasan Teori

Teori Akuntansi Pendapatan

Pendapatan merupakan aktivitas ekonomi yang dilakukan untuk memperoleh laba. Laba sendiri adalah selisih antara jumlah pendapatan dengan total biaya yang dikeluarkan. Istilah pendapatan sering menimbulkan kebingungan karena dapat diartikan sebagai *revenue* maupun *income*. *Income* lebih mengarah pada penghasilan, sedangkan *revenue* dapat diartikan sebagai pendapatan yang mencakup penghasilan maupun keuntungan (Ardiany dan Amanda, 2025). Pendapatan terbagi menjadi dua jenis yakni pendapatan operasional dan non operasional. Menurut Ardiany dan Amanda (2025), pendapatan operasional adalah pendapatan yang berasal dari penjualan barang, produk, atau jasa dalam suatu periode tertentu yang berkaitan langsung dengan kegiatan utama perusahaan. Pendapatan ini bersifat normal dan terjadi secara berulang selama perusahaan menjalankan operasinya. Pendapatan non operasional, yaitu pendapatan yang diperoleh dari aktivitas di luar kegiatan utama perusahaan. Pendapatan ini disajikan dalam laporan laba rugi sebesar nilai bersih yang diperoleh. Pendapatan non operasional merupakan pendapatan yang diperoleh perusahaan dalam suatu periode tertentu yang tidak berasal dari kegiatan utama perusahaan. Dalam laporan laba rugi, pendapatan ini disajikan secara neto, yaitu setelah dikurangi biaya atau beban yang berhubungan langsung dengan pendapatan tersebut (Ardiany & Amanda, 2025). Berdasarkan jenis pendapatan tersebut, terdapat beberapa karakteristik pendapatan, yaitu:

1. Apabila saldo pendapatan meningkat, maka pencatatannya dilakukan pada sisi kredit. Setiap pencatatan di sisi kredit akan menambah jumlah saldo pendapatan. Pendapatan terjadi atau bertambah ketika kegiatan bongkar muat telah selesai. Contohnya, ketika perusahaan menerima atau mengakui pendapatan jasa bongkar muat petikemas dan non petikemas maka jurnal yang dibuat adalah:

Tabel 1. Jurnal perusahaan menerima pendapatan jasa bongkar muat petikemas dan non petikemas

Akun	Debit	Kredit
Piutang Usaha	Rp. XXXX	
Pendapatan Petikemas/ Non Petikemas		Rp. XXXX

2. Sebaliknya, jika saldo pendapatan menurun, maka pencatatannya dilakukan pada sisi debit. Setiap pencatatan di sisi debit akan mengurangi jumlah saldo pendapatan. Misalnya, jika terdapat kesalahan pencatatan pendapatan jasa terminal yang harus dikoreksi berupa reklas yang pindah COA, atau batal nota yang dapat berupa salah customer, salah nominal, maka jurnalnya adalah:

Tabel 2. Jurnal jika terdapat kesalahan pencatatan atau batal nota

Akun	Debit	Kredit
Pendapatan	Rp. XXXX	
Piutang Usaha		Rp. XXXX

Teori Basis Akrua (*Accrual Basis*)

Basis akrual merupakan dasar penyusunan laporan keuangan yang mengakui dampak transaksi dan peristiwa ekonomi pada saat hak dan kewajiban ekonomi timbul, bukan semata-mata ketika kas diterima atau dibayarkan. Dalam basis akrual, pendapatan dan beban diakui pada periode ketika peristiwa ekonomi yang mendasarinya terjadi sehingga informasi yang disajikan dapat menggambarkan kinerja dan posisi keuangan entitas secara lebih representatif. Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan menempatkan akuntansi akrual sebagai dasar yang mencerminkan dampak transaksi dan peristiwa pada periode terjadinya, sehingga memberikan informasi mengenai sumber daya ekonomi dan klaim terhadap entitas yang lebih relevan bagi pengguna laporan keuangan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2019; IASB, 2018).

Dalam konteks penyajian laporan keuangan, penerapan basis akrual juga berkaitan dengan pengakuan aset dan liabilitas pada periode ketika hak dan kewajiban ekonomi timbul. PSAK 201 tentang Penyajian Laporan Keuangan merupakan standar yang mengatur persyaratan penyajian laporan keuangan, termasuk penyajian posisi keuangan dan unsur-unsur laporan keuangan berdasarkan karakteristiknya. Oleh karena itu, basis akrual menjadi dasar konseptual penting dalam menentukan kapan suatu beban dan kewajiban harus diakui, termasuk ketika perusahaan telah menerima manfaat jasa tetapi belum melakukan pembayaran.

Penerapan basis akrual memiliki konsekuensi penting terhadap ketepatan pengakuan beban. Apabila beban yang telah terjadi baru dicatat ketika kas dibayarkan, maka beban dapat berpindah ke periode berikutnya dan menyebabkan informasi laba periode berjalan tidak mencerminkan aktivitas ekonomi yang sebenarnya. Sebaliknya, pengakuan beban pada saat manfaat ekonomi telah diterima memungkinkan laporan keuangan mencerminkan kewajiban dan beban yang timbul pada periode pelaporan. Dengan demikian, basis akrual menjadi dasar utama dalam pengakuan Biaya yang Masih Harus Dibayar (BYMHD).

Pengakuan Beban dan *Matching Principle*

Pengakuan beban dalam basis akrual berkaitan dengan pengukuran kinerja ekonomi perusahaan selama periode pelaporan. Beban diakui ketika terjadi konsumsi manfaat ekonomi atau ketika kewajiban yang berkaitan dengan aktivitas perusahaan timbul. Dalam konteks penelitian ini, pengakuan beban menjadi penting karena aktivitas operasional perusahaan dapat telah selesai atau manfaat jasa telah diterima sebelum proses administrasi dan pembayaran kepada vendor diselesaikan.

Konsep tersebut berkaitan dengan *matching principle*, yaitu keterkaitan antara pengakuan biaya dengan aktivitas ekonomi yang menghasilkan pendapatan selama suatu periode. Dalam perusahaan jasa kepelabuhanan, aktivitas bongkar muat, jasa sandar kapal, tenaga kerja bongkar muat, pemeliharaan peralatan, utilitas, dan jasa pihak ketiga merupakan bagian dari aktivitas operasional yang menimbulkan biaya. Ketika manfaat jasa tersebut telah diterima pada suatu periode, biaya yang terkait perlu tercermin pada periode yang sama agar kinerja ekonomi perusahaan tidak terdistorsi oleh perbedaan waktu antara terjadinya aktivitas dan pembayaran kas.

Namun, *matching principle* dalam penelitian ini tidak dipahami semata-mata sebagai kewajiban mencocokkan setiap beban dengan pendapatan tertentu secara langsung. Prinsip tersebut digunakan untuk menjelaskan pentingnya pengakuan beban pada periode ketika aktivitas ekonomi yang mendasarinya terjadi. Dengan demikian, apabila pekerjaan vendor telah selesai pada akhir periode tetapi invoice belum diterima, perusahaan tetap perlu mempertimbangkan pengakuan kewajiban dan beban berdasarkan substansi ekonomi transaksi.

Teori Biaya Yang Masih Harus Dibayar (BYMHD) (*Accrued expenses*)

Biaya yang Masih Harus Dibayar (BYMHD) atau *accrued expenses* merupakan kewajiban yang timbul karena perusahaan telah menerima barang atau jasa dan manfaat ekonominya telah terjadi, tetapi pembayaran atau penyelesaian kewajiban belum dilakukan pada akhir periode pelaporan. Dalam perspektif laporan keuangan, BYMHD berkaitan dengan pengakuan beban sekaligus kewajiban yang timbul dari aktivitas ekonomi yang telah terjadi. Pengakuan BYMHD merupakan konsekuensi dari penerapan basis akrual. Ketika jasa telah diberikan kepada perusahaan atau manfaat jasa telah diterima, keberadaan invoice tidak menjadi satu-satunya dasar untuk menentukan apakah beban telah terjadi. Informasi mengenai kontrak, *Purchase Order* (PO), *Surat Perintah Kerja* (SPK), berita acara, dan laporan progres pekerjaan dapat digunakan untuk mendukung estimasi kewajiban pada akhir periode.

Secara umum, pengakuan BYMHD dilakukan dengan mencatat beban terkait pada sisi debit dan BYMHD sebagai kewajiban pada sisi kredit. Pencatatan tersebut memungkinkan perusahaan mengakui beban pada periode ketika manfaat ekonomi diterima sekaligus mengakui kewajiban yang akan diselesaikan pada periode berikutnya.

Tabel 3. Jurnal BYMHD

Akun	Debit	Kredit
Beban terkait	Rp XXXX	-
Biaya yang Masih Harus Dibayar (BYMHD)	-	Rp XXXX

Apabila invoice diterima pada periode berikutnya, nilai estimasi BYMHD perlu dibandingkan dengan nilai aktual berdasarkan dokumen tagihan. Perbedaan antara nilai estimasi dan nilai aktual perlu diverifikasi dan disesuaikan sesuai dengan kebijakan akuntansi perusahaan. Oleh karena itu, pengakuan BYMHD tidak hanya mencakup proses pencatatan pada akhir periode, tetapi juga mencakup proses verifikasi, rekonsiliasi, dan penyesuaian pada periode berikutnya. Kegagalan mengakui beban yang telah terjadi dapat menyebabkan understatement beban dan kewajiban serta overstatement laba pada periode berjalan. Sebaliknya, pengakuan BYMHD yang didukung estimasi dan dokumen yang memadai dapat membantu meningkatkan ketepatan *cut-off* serta kewajaran penyajian laporan keuangan.

Pengakuan BYMHD pada Perusahaan Jasa Kepelabuhanan

Pengakuan BYMHD menjadi semakin relevan pada perusahaan jasa kepelabuhanan karena aktivitas operasional melibatkan berbagai jenis layanan dan pihak ketiga yang memiliki siklus penyelesaian pekerjaan dan administrasi yang tidak selalu bertepatan dengan akhir periode pelaporan. Pada PT Pelindo Multi Terminal Branch Jamrud Nilam Mirah, aktivitas seperti jasa bongkar muat, penggunaan tenaga kerja bongkar muat, pemeliharaan peralatan, penyewaan alat, utilitas, dan jasa pendukung lainnya dapat telah dilaksanakan pada akhir periode, sementara invoice dari vendor baru diterima pada periode berikutnya. Kondisi tersebut menciptakan *timing gap* antara terjadinya aktivitas ekonomi dan tersedianya dokumen tagihan. Kondisi operasional tersebut telah diidentifikasi dalam penelitian ini sebagai salah satu konteks utama pengakuan BYMHD pada perusahaan.

Dalam kondisi tersebut, perusahaan perlu menentukan apakah kewajiban ekonomi telah timbul pada akhir periode berdasarkan bukti bahwa manfaat jasa telah diterima. Dokumen seperti kontrak, PO, SPK, berita acara penyelesaian pekerjaan, dan laporan progres menjadi penting dalam mendukung estimasi nilai BYMHD. Nilai yang telah diakui selanjutnya perlu diverifikasi dengan invoice aktual yang diterima pada periode berikutnya. Mekanisme tersebut memungkinkan perusahaan mengidentifikasi perbedaan antara nilai estimasi dan realisasi serta melakukan penyesuaian apabila diperlukan. Dengan demikian, pengakuan BYMHD pada perusahaan jasa kepelabuhanan tidak hanya merupakan aktivitas pencatatan akuntansi, tetapi juga merupakan bagian dari pengendalian proses *cut-off*. Ketepatan pengakuan bergantung pada kemampuan perusahaan menghubungkan informasi operasional dengan proses akuntansi secara tepat waktu. Hal tersebut menjadikan koordinasi antara bagian operasional dan accounting sebagai faktor penting dalam menjaga keandalan estimasi kewajiban dan kualitas laporan keuangan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus pada PT Pelindo Multi Terminal Branch Jamrud Nilam Mirah. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami secara mendalam proses penerapan *accrual basis* dalam pengakuan Biaya yang Masih Harus Dibayar (BYMHD) berdasarkan kondisi operasional perusahaan jasa kepelabuhanan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengkaji proses, aktivitas, dan praktik akuntansi secara kontekstual dalam lingkungan organisasi (Creswell & Poth, 2018). Penelitian dilaksanakan selama lima bulan, yaitu Januari 2026 sampai dengan Mei 2026, bersamaan dengan kegiatan magang pada PT Pelindo Multi Terminal Branch Jamrud Nilam Mirah. Selama periode tersebut, peneliti melakukan observasi terhadap aktivitas operasional, proses *closing* laporan keuangan, pencatatan jurnal penyesuaian, serta proses verifikasi dan rekonsiliasi yang berkaitan dengan pengakuan BYMHD.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi langsung dan klarifikasi kepada tiga informan yang terlibat dalam proses pengakuan dan pencatatan BYMHD pada bagian Accounting dan Finance. Pemilihan informan dilakukan secara purposive dengan mempertimbangkan keterlibatan dan pengetahuan informan terhadap proses identifikasi biaya, penentuan estimasi BYMHD, pencatatan jurnal penyesuaian, proses *cut-off*, serta verifikasi dan rekonsiliasi dengan invoice. Klarifikasi kepada informan digunakan untuk memperoleh informasi mengenai prosedur pengakuan BYMHD dan untuk mengkonfirmasi hasil observasi terhadap praktik yang berlangsung di perusahaan. Data sekunder diperoleh melalui penelaahan dokumen perusahaan yang berkaitan dengan pengakuan BYMHD, meliputi laporan keuangan, jurnal penyesuaian, *Purchase Order* (PO), *Surat Perintah Kerja* (SPK), kontrak kerja sama dengan vendor, *Standard Operating Procedure* (SOP), laporan progres pekerjaan, berita acara penyelesaian pekerjaan, serta invoice atau dokumen penagihan yang diterima pada periode berikutnya. Selain itu, penelitian menggunakan literatur ilmiah, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), dan referensi internasional yang relevan sebagai dasar konseptual dalam menganalisis penerapan *accrual basis*, *matching principle*, pengakuan beban, dan kewajiban jangka pendek. Jenis sumber data dan dokumen tersebut konsisten dengan proses pengakuan BYMHD yang dijelaskan dalam naskah penelitian, yaitu penggunaan kontrak, PO, SPK, dan laporan progres sebagai dasar identifikasi serta estimasi kewajiban.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, dokumentasi, dan klarifikasi kepada informan. Observasi dilakukan secara partisipatif selama lima bulan kegiatan magang dengan mengamati aktivitas operasional pada terminal Jamrud, Nilam, dan Mirah, proses *closing* laporan keuangan, identifikasi pekerjaan atau jasa yang telah selesai tetapi belum ditagihkan, penyusunan jurnal penyesuaian BYMHD, serta proses rekonsiliasi antara nilai BYMHD yang telah diakui dengan invoice yang diterima pada periode berikutnya. Dokumentasi dilakukan dengan menelaah dokumen akuntansi dan dokumen operasional yang menjadi dasar pengakuan BYMHD, terutama kontrak, PO, SPK, laporan progres pekerjaan, berita acara penyelesaian pekerjaan, jurnal penyesuaian, dan invoice. Klarifikasi dilakukan kepada tiga informan untuk memperoleh penjelasan mengenai proses identifikasi kewajiban, dasar estimasi nilai BYMHD, mekanisme *cut-off*, verifikasi dokumen, serta tindakan yang dilakukan apabila terdapat perbedaan antara nilai BYMHD yang diestimasi dan nilai invoice aktual. Dengan demikian,

proses pengumpulan data tidak hanya didasarkan pada pengamatan aktivitas perusahaan, tetapi juga menggunakan dokumen dan informasi dari pihak yang terlibat langsung dalam proses akuntansi.

Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari tiga informan dengan informasi yang berasal dari bagian operasional, bagian Accounting dan Finance, serta dokumen perusahaan yang menjadi dasar pengakuan BYMHD. Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil observasi, dokumentasi, dan klarifikasi kepada informan. Apabila informasi mengenai suatu transaksi atau proses pengakuan BYMHD memiliki kesesuaian antara hasil observasi, keterangan informan, dan dokumen pendukung, informasi tersebut digunakan sebagai dasar interpretasi penelitian. Sebaliknya, apabila ditemukan perbedaan informasi, peneliti melakukan klarifikasi kembali terhadap pihak terkait dan menelusuri dokumen pendukung untuk memperoleh penjelasan yang lebih memadai. Teknik triangulasi tersebut digunakan untuk meningkatkan kredibilitas dan *trustworthiness* data penelitian (Lincoln & Guba, 1985; Patton, 1999). Prosedur triangulasi ini juga sesuai dengan rancangan penelitian sebelumnya yang membandingkan informasi dari bagian operasional, bagian keuangan, dan dokumen perusahaan serta menggunakan observasi, dokumentasi, dan klarifikasi sebagai teknik pengumpulan data.

Analisis data dilakukan menggunakan kerangka STAR (*Situation, Task, Action, Result*) sebagai *analytical framework* untuk mengorganisasi dan menginterpretasikan temuan mengenai penerapan *accrual basis* dalam pengakuan BYMHD. STAR dalam penelitian ini tidak digunakan sebagai metode pengumpulan data, melainkan sebagai kerangka analisis untuk menghubungkan kondisi operasional, permasalahan pengakuan biaya, tindakan pengendalian, dan hasil penerapan BYMHD. Tahap *Situation* digunakan untuk mengidentifikasi kondisi ketika pekerjaan atau jasa telah selesai dan manfaat ekonominya telah diterima perusahaan, tetapi invoice belum diterima pada akhir periode pelaporan. Tahap *Task* digunakan untuk mengidentifikasi tantangan perusahaan dalam menentukan estimasi kewajiban, memperoleh dokumen pendukung, dan menjaga ketepatan *cut-off*. Tahap *Action* digunakan untuk menganalisis tindakan yang dilakukan perusahaan, meliputi verifikasi kontrak, PO, SPK, laporan progres dan dokumen pendukung, rekonsiliasi informasi operasional dengan bagian Accounting, serta pencatatan jurnal penyesuaian. Tahap *Result* digunakan untuk mengevaluasi hasil penerapan proses tersebut terhadap ketepatan pengakuan beban dan kewajiban, ketepatan *cut-off*, penyajian kewajiban jangka pendek, serta risiko salah saji (*misstatement*) dalam laporan keuangan. Penggunaan STAR sebagai kerangka analisis memungkinkan temuan lapangan disusun secara sistematis dari kondisi yang dihadapi perusahaan, tantangan dalam pengakuan BYMHD, tindakan yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan, hingga hasil dan implikasinya terhadap kualitas pelaporan keuangan.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil observasi selama kegiatan magang, telaah dokumen akuntansi, serta klarifikasi kepada pihak yang terlibat dalam proses pengakuan BYMHD pada PT Pelindo Multi Terminal Branch Jamrud Nilam Mirah, ditemukan bahwa pengakuan Biaya yang Masih Harus Dibayar (BYMHD) dilakukan terhadap biaya operasional yang manfaat ekonominya telah diterima perusahaan pada periode berjalan, tetapi invoice dari vendor belum diterima sampai akhir periode pelaporan. Biaya yang diidentifikasi meliputi jasa bongkar muat, jasa tenaga kerja bongkar muat (TKBM), penyewaan alat operasional, utilitas, pemeliharaan peralatan terminal, dan jasa pihak ketiga lainnya. Identifikasi biaya tidak hanya didasarkan pada keberadaan invoice, tetapi juga pada bukti bahwa pekerjaan atau jasa telah direalisasikan, yang ditunjukkan melalui kontrak, *Purchase Order* (PO), *Surat Perintah Kerja* (SPK), dan laporan progres pekerjaan.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa pengakuan BYMHD pada perusahaan tidak bergantung pada waktu diterimanya invoice, tetapi pada substansi ekonomi dari transaksi. Dengan demikian, ketika jasa telah diberikan dan manfaatnya telah diterima perusahaan sebelum tanggal pelaporan, kewajiban tetap perlu diakui meskipun dokumen tagihan dari vendor belum diterima. Kondisi tersebut merupakan penerapan prinsip akrual karena pengakuan beban dan kewajiban didasarkan pada terjadinya transaksi dan penerimaan manfaat ekonomi, bukan semata-mata pada arus kas. Temuan ini juga memperlihatkan bahwa kompleksitas aktivitas kepelabuhanan, yang melibatkan berbagai vendor dan pekerjaan yang

dapat diselesaikan mendekati akhir periode, meningkatkan kebutuhan perusahaan terhadap mekanisme identifikasi biaya sebelum invoice diterima.

Mekanisme Pengakuan BYMHD dan Ketepatan Cut-off

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengakuan BYMHD dimulai dari identifikasi pekerjaan atau jasa yang telah selesai atau telah memberikan manfaat ekonomi pada akhir periode pelaporan. Bagian operasional memberikan informasi mengenai realisasi pekerjaan beserta dokumen pendukung kepada bagian Accounting. Dokumen tersebut kemudian diverifikasi untuk memastikan bahwa pekerjaan memang telah dilaksanakan dan memiliki dasar kontraktual yang dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, nilai BYMHD diestimasi dengan mengacu pada kontrak, PO, SPK, dan laporan progres pekerjaan. Selanjutnya, Accounting melakukan pencatatan jurnal penyesuaian pada akhir periode pelaporan.

Proses tersebut dapat dipahami sebagai mekanisme *cut-off* untuk memastikan bahwa beban yang berkaitan dengan aktivitas pada periode berjalan tidak tertunda pengakuannya hanya karena invoice belum diterima. Apabila biaya tersebut tidak diakui sampai invoice diterima pada periode berikutnya, beban periode berjalan berpotensi mengalami *understatement*, sedangkan laba dan kewajiban lancar berpotensi mengalami *overstatement* dan *understatement*. Oleh karena itu, pengakuan BYMHD memiliki peran penting dalam menjaga kewajaran laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan.

Temuan ini memperkuat konsep *matching principle*, yaitu pengakuan beban pada periode yang berkaitan dengan pendapatan yang dihasilkan. Dalam konteks jasa kepelabuhanan, prinsip tersebut menjadi relevan karena biaya tenaga kerja, penggunaan alat, utilitas, dan jasa pihak ketiga dapat terjadi dan memberikan manfaat dalam periode ketika pendapatan jasa kepelabuhanan dihasilkan, sedangkan pembayaran kepada vendor baru terjadi pada periode berikutnya. Dengan demikian, BYMHD menjadi mekanisme yang menghubungkan waktu terjadinya aktivitas ekonomi dengan waktu pengakuan beban dalam laporan keuangan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Putra (2021) yang menunjukkan bahwa penerapan basis akrual diperlukan agar biaya yang mendukung pendapatan periode berjalan, termasuk biaya yang invoice-nya belum diterbitkan, tetap diakui pada periode yang sesuai. Namun, penelitian ini memberikan penekanan yang lebih spesifik bahwa dalam perusahaan jasa kepelabuhanan, ketepatan *cut-off* sangat bergantung pada kemampuan bagian Accounting memperoleh informasi realisasi pekerjaan dari bagian operasional sebelum invoice diterbitkan.

Estimasi BYMHD dan Penanganan Perbedaan Nilai dengan Invoice Aktual

Temuan penting penelitian ini terletak pada proses setelah BYMHD diakui. Karena invoice belum tersedia pada saat *closing*, nilai kewajiban yang dicatat merupakan estimasi berdasarkan dokumen yang tersedia. Pada periode berikutnya, setelah invoice diterima dari vendor, bagian Accounting melakukan rekonsiliasi antara nilai BYMHD yang telah dicatat dengan nilai tagihan aktual. Apabila nilai invoice sama dengan nilai yang sebelumnya diakui, saldo BYMHD dapat diselesaikan sesuai nilai kewajiban yang telah dicatat. Sebaliknya, apabila terdapat perbedaan antara nilai estimasi dan nilai invoice aktual, dilakukan penyesuaian terhadap selisih tersebut sehingga saldo kewajiban mencerminkan nilai aktual yang harus dibayarkan perusahaan. Mekanisme verifikasi ulang tersebut ditemukan sebagai bagian dari proses pengendalian atas pengakuan BYMHD. Dengan demikian, deviasi antara nilai estimasi BYMHD dan invoice aktual tidak diperlakukan sebagai kesalahan yang dibiarkan dalam saldo kewajiban, tetapi menjadi objek rekonsiliasi dan penyesuaian pada periode berikutnya. Mekanisme ini penting karena estimasi BYMHD memiliki risiko ketidakakuratan apabila informasi mengenai progres pekerjaan, volume pekerjaan, tarif, atau dasar kontraktual belum tersedia secara lengkap pada saat *closing*. Oleh sebab itu, proses pengakuan BYMHD tidak berhenti pada pencatatan jurnal penyesuaian, tetapi harus dilanjutkan dengan *review* atas realisasi transaksi. Temuan ini memperlihatkan bahwa kualitas penerapan *accrual basis* tidak hanya ditentukan oleh kemampuan perusahaan mencatat kewajiban sebelum invoice diterima, tetapi juga oleh kemampuan perusahaan mengendalikan perbedaan antara estimasi dan realisasi. Dengan kata lain, terdapat dua titik pengendalian penting dalam proses BYMHD, yaitu validasi estimasi sebelum pencatatan dan rekonsiliasi terhadap invoice setelah pencatatan. Kedua proses tersebut menjadi mekanisme untuk mengurangi risiko salah saji pada laporan keuangan.

Koordinasi Operasional dan Accounting sebagai Faktor Pengendalian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi telah terintegrasi dengan aktivitas operasional pada Terminal Jamrud, Nilam, dan Mirah sehingga informasi mengenai aktivitas yang telah terjadi dapat digunakan oleh bagian Accounting dalam proses identifikasi biaya sebelum invoice diterima. Namun, integrasi sistem tidak secara otomatis menghilangkan risiko kesalahan estimasi. Keakuratan pengakuan BYMHD tetap bergantung pada ketepatan informasi yang diberikan oleh bagian operasional dan kemampuan Accounting dalam memverifikasi informasi tersebut.

Temuan ini menunjukkan bahwa koordinasi lintas fungsi merupakan faktor penting dalam keberhasilan penerapan basis akrual. Bagian operasional memiliki informasi mengenai penyelesaian pekerjaan dan realisasi aktivitas, sedangkan bagian Accounting memiliki tanggung jawab untuk menerjemahkan informasi tersebut menjadi pengakuan beban dan kewajiban dalam laporan keuangan. Apabila informasi operasional terlambat atau tidak lengkap, proses estimasi BYMHD juga berpotensi mengalami keterlambatan atau ketidakakuratan. Temuan tersebut memperluas penelitian Nugraha dan Dwiana (2023) yang menunjukkan bahwa pemanfaatan sistem informasi akuntansi berbasis akrual dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi pencatatan. Dalam konteks penelitian ini, sistem informasi memang mendukung proses pencatatan, tetapi efektivitas sistem tetap dipengaruhi oleh kualitas koordinasi manusia dan kelengkapan bukti transaksi. Dengan demikian, digitalisasi tidak dapat sepenuhnya menggantikan proses verifikasi dan *professional judgment* dalam menentukan kewajiban yang harus diakui pada akhir periode.

Implikasi Pengakuan BYMHD terhadap Kualitas Laporan Keuangan dan Keputusan Manajerial

Pengakuan BYMHD memberikan implikasi langsung terhadap kualitas informasi laporan keuangan karena memungkinkan beban dan kewajiban dicatat pada periode ketika manfaat ekonomi telah diterima. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan tersebut membantu menjaga ketepatan *cut-off*, meningkatkan kewajaran penyajian kewajiban lancar, dan membuat laporan laba rugi lebih mencerminkan kondisi ekonomi perusahaan pada periode berjalan.

Implikasi tersebut tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap prinsip akuntansi, tetapi juga dengan kebutuhan informasi manajemen. Dengan adanya pengakuan BYMHD, manajemen dapat mengetahui beban operasional yang telah terjadi meskipun pembayaran kepada vendor belum dilakukan dan invoice belum diterima. Informasi tersebut dapat digunakan dalam evaluasi biaya, pengendalian anggaran, dan penilaian efisiensi operasional tanpa harus menunggu seluruh dokumen tagihan diterima. Dengan demikian, BYMHD memiliki fungsi informasional selain fungsi administratif dalam pelaporan keuangan. Hasil ini mendukung penelitian Saraswati (2025) yang menunjukkan bahwa penerapan basis akrual dapat meningkatkan transparansi informasi keuangan. Namun, penelitian ini memberikan temuan yang lebih spesifik pada perusahaan jasa kepelabuhanan, yaitu bahwa kualitas pelaporan tidak hanya ditentukan oleh penerapan basis akrual secara konseptual, tetapi juga oleh ketepatan identifikasi pekerjaan yang telah selesai, kualitas estimasi BYMHD, kelengkapan dokumen pendukung, koordinasi antara operasional dan Accounting, serta rekonsiliasi dengan invoice aktual.

Sintesis Temuan Berdasarkan Kerangka STAR

Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, kerangka STAR digunakan untuk mensintesis hubungan antara kondisi operasional, tantangan, tindakan pengendalian, dan hasil penerapan BYMHD. *Situation* dalam penelitian ini ditunjukkan oleh adanya pekerjaan atau jasa yang telah memberikan manfaat ekonomi pada akhir periode, sementara invoice belum diterima. *Task* muncul dalam bentuk kebutuhan untuk menentukan estimasi kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan dan menjaga ketepatan *cut-off*. *Action* diwujudkan melalui verifikasi dokumen, koordinasi antara bagian operasional dan Accounting, pencatatan jurnal penyesuaian, serta rekonsiliasi dengan invoice pada periode berikutnya. Adapun *Result* ditunjukkan oleh meningkatnya ketepatan pengakuan beban dan kewajiban serta berkurangnya risiko salah saji akibat keterlambatan invoice. Dengan demikian, STAR dalam penelitian ini tidak ditempatkan sebagai pengulangan tahapan operasional perusahaan, melainkan sebagai kerangka interpretasi yang menghubungkan temuan empiris dengan implikasinya terhadap kualitas pelaporan keuangan. Temuan utama penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan pengakuan BYMHD pada perusahaan jasa kepelabuhanan tidak hanya bergantung pada penerapan *accrual basis*, tetapi pada suatu rangkaian pengendalian yang terdiri atas identifikasi pekerjaan, estimasi berbasis dokumen, verifikasi sebelum *closing*, pencatatan jurnal penyesuaian, dan rekonsiliasi terhadap invoice

aktual. Mekanisme tersebut menjadi pembeda utama penelitian ini dibandingkan penelitian terdahulu yang lebih banyak membahas manfaat basis akrual secara umum.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *accrual basis* dalam pengakuan Biaya yang Masih Harus Dibayar (BYMHD) pada PT Pelindo Multi Terminal Branch Jamrud Nilam Mirah telah dilaksanakan melalui proses identifikasi kewajiban operasional, estimasi biaya berdasarkan dokumen pendukung, pencatatan jurnal penyesuaian, serta rekonsiliasi antara nilai estimasi dan invoice aktual pada periode berikutnya. Proses tersebut mendukung penerapan teori *matching principle* sehingga beban diakui pada periode saat manfaat ekonomi diperoleh, meskipun pembayaran maupun invoice dari vendor belum diterima.

Berdasarkan analisis menggunakan metode STAR (*Situation, Task, Action, Result*), penelitian ini menemukan bahwa keberhasilan penerapan pengakuan BYMHD ditentukan oleh penerapan *accrual basis* dan koordinasi antara bagian operasional dan *accounting*, ketersediaan dokumen pendukung, serta mekanisme verifikasi dan rekonsiliasi sebagai bagian dari pengendalian internal. Temuan ini memperluas pemahaman mengenai implementasi pengakuan kewajiban berbasis akrual pada perusahaan jasa kepelabuhanan yang memiliki karakteristik operasional lebih kompleks dibandingkan sektor usaha lainnya. Hasil penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur akuntansi dengan menunjukkan bahwa metode STAR dapat dimanfaatkan sebagai *analytical framework* untuk mengevaluasi proses implementasi pengakuan BYMHD berbasis *accrual basis* secara sistematis. Hasil penelitian ini juga memberikan rekomendasi bagi perusahaan untuk memperkuat koordinasi lintas fungsi, meningkatkan digitalisasi dokumen operasional, dan menyempurnakan proses *cut-off* agar kualitas laporan keuangan, transparansi, dan ketepatan informasi keuangan dalam pengambilan keputusan manajerial dapat terus ditingkatkan.

Penelitian ini terbatas pada satu objek penelitian, yaitu PT Pelindo Multi Terminal Branch Jamrud Nilam Mirah, sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasi pada seluruh perusahaan jasa kepelabuhanan. Selain itu, penelitian lebih berfokus pada proses pengakuan BYMHD berdasarkan pendekatan kualitatif sehingga belum mengukur pengaruhnya secara kuantitatif terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan studi komparatif pada beberapa terminal pelabuhan atau mengombinasikan pendekatan kualitatif dan kuantitatif (*mixed methods*) guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai implementasi pengakuan kewajiban berbasis akrual.

Berdasarkan hasil penelitian, PT Pelindo Multi Terminal Branch Jamrud Nilam Mirah disarankan untuk terus memperkuat koordinasi antara bagian operasional dan bagian *accounting* melalui optimalisasi sistem informasi akuntansi yang terintegrasi serta digitalisasi dokumen pendukung, seperti *Purchase Order* (PO), Surat Perintah Kerja (SPK), berita acara penyelesaian pekerjaan, dan *invoice* elektronik. Penguatan integrasi data tersebut diharapkan dapat meningkatkan ketepatan proses *cut-off*, mempercepat identifikasi Biaya yang Masih Harus Dibayar (BYMHD), meminimalkan risiko *misstatement*, serta mendukung penyajian laporan keuangan yang lebih andal dan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan penelitian ini melalui beberapa pendekatan dengan penelitian kuantitatif guna menguji pengaruh penerapan *accrual basis* dan pengakuan BYMHD terhadap kualitas laporan keuangan, ketepatan proses *cut-off*, maupun efektivitas pengendalian internal. Peneliti selanjutnya juga dapat melakukan studi komparatif pada beberapa terminal pelabuhan atau perusahaan jasa kepelabuhanan lainnya sehingga dapat diketahui perbedaan praktik pengakuan BYMHD pada karakteristik operasional yang berbeda. Selanjutnya, juga dapat mengembangkan penelitian mengenai integrasi teknologi digital, seperti *Enterprise Resource Planning* (ERP), *e-invoicing*, *electronic document management*, atau pemanfaatan *Artificial Intelligence* (AI) dalam proses estimasi dan verifikasi BYMHD untuk meningkatkan akurasi pencatatan serta efisiensi proses pelaporan keuangan. Penelitian selanjutnya juga dapat menggunakan pendekatan *mixed methods* agar mampu

mengombinasikan analisis kuantitatif dan pemahaman kualitatif mengenai implementasi pengakuan kewajiban berbasis akrual secara lebih komprehensif.

Referensi

- Ardiany, Y., & Amanda, S. (2025). Pengakuan Pendapatan Perusahaan Real Estate Berdasarkan PSAK No. 72 Pada PT Melia Cakrawala Indonesia. *Jurnal Akademi Akuntansi Indonesia Padang*, 5(1), 143–156. <https://doi.org/10.31933/gakjsb56>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (4th ed.). Sage Publications. <https://us.sagepub.com/en-us/nam/qualitative-inquiry-and-research-design/book246896>
- Hafizah, Q. (2025). Fakta Luas Laut Indonesia Tiga Kali Lipat Daratannya. <https://Rri.Co.Id/Mataram/Berita-Lain/1689933/Fakta-Luas-Laut-Indonesia-Tiga-Kali-Lipat-Daratannya>.
- Hendrawan, B., Sri Luayyi, & Puji Rahayu. (2023). Pengaruh Imbalan Pasca Kerja, Biaya Yang Masih Harus Di Bayar Dan Jumlah Omset Terhadap Beban Pajak Kini (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017-2019). *Jurnal Ilmiah Cendekia Akuntansi*, 8(1), 48–60. <https://scholar.archive.org/work/atrc74f7nez7g75dfqf6hszge/access/wayback/https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/CendekiaAkuntansi/article/download/2948/1867>
- Herawati, H. (2019). Pentingnya Laporan Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Perusahaan. *JAZ: Jurnal Akuntansi Unihaz*, (Vol. 2 No. 1 (2019): JAZ: Jurnal Akuntansi Unihaz). <https://journals.unihaz.ac.id/index.php/jaz/article/view/806>
- IFRS Foundation. (2021). *IAS 1 Presentation of Financial Statements*. <https://www.ifrs.org/issued-standards/list-of-standards/ias-1-presentation-of-financial-statements/>
- Ikaputri, D., & Fatima, E. (2023). Evaluasi Penerapan Pengendalian Internal atas Proses Bisnis Pendapatan Jasa: (Studi Kasus pada Perusahaan Depo Peti Kemas). *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi, Volume 7 Nomor 4*. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i4.1663>
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). (2024). *Standar Akuntansi Keuangan (SAK)*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- International Accounting Standards Board (IASB). (2018). *Conceptual Framework for Financial Reporting*. London: IFRS Foundation. <https://www.ifrs.org/issued-standards/list-of-standards/conceptual-framework/>
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic Inquiry*. Sage Publications. <https://us.sagepub.com/en-us/nam/naturalistic-inquiry/book842>
- Manggala, G. (2025). Strategi Poros Maritim Dunia Dalam Mewujudkan Pengembalian Identitas Indonesia Sebagai Bangsa Maritim. *Indonesian Journal of International Relations*, 9(1), 116–138. <https://doi.org/10.32787/ijir.v9i1.656>
- Nugraha, R. W. ., & Dwiana, Y. C. (2023). Analisis dan Implementasi Sistem Informasi Akuntansi Menggunakan Metode *Accrual Basis* (Studi Kasus: CV Satu Holiday Tour dan Travel Bandung). *Jurnal Akuntansi*, 15(1), 28–37. <https://doi.org/10.28932/jam.v15i1.5541>
- Nurhayati, A., Akbari, S., Septiana Dewi, S., Eka Lailatun, N., & Dahlia Pengaribuan, R. (2025). Analisis Pengakuan Pendapatan dan Beban Dalam Penyajian Laporan Laba Rugi Pada PT. Siantar Top Tbk. *AT-TAKLIM: Jurnal Pendidikan Multidisiplin*, 2(1), 340–352. <https://journal.hasbaedukasi.co.id/index.php/at-taklim>
- Octsalsabilla, N., Muhammad, A., Kartika, S., Nabila, P., & Fazirah, F. (2025). Analisis Penyesuaian Liabilitas Dalam Laporan Keuangan Terhadap Konsep Dasar Akuntansi Pada PT. Adhi Karya (persero) Tbk. *Neraca Manajemen, Ekonomi*, 21(4). <https://cibangsa.com/index.php/musyitari/article/view/3999>
- Patton, M. Q. (1999). Enhancing the Quality and Credibility of Qualitative Analysis. *Health Services Research*, 34(5), 1189–1208. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1089059/>

- Putra, D. M., & Sulistyowati, W. A. (2021). Measuring Impact of the Accrual Accounting Implementation on Fiscal Transparency Quality: A Mixed Methods Study in Indonesia. *Journal of Accounting and Investment*, 22(3), 460–481. <https://doi.org/10.18196/jai.v22i3.11441>
- Safri, S. (2024). Analisis Gagal Cutoff Sistem Informasi Akuntansi Pada Tutup Buku Database Di Pt Xyz Tahun 2023. *JURNAL BISNIS DAN AKUNTANSI UNSURYA*, Vol. 9 No. 1. <https://doi.org/10.35968/jbau.v9i1.1174>
- Saraswati, L. R. (2025). Penerapan Metode Akuntansi Berbasis Akrua pada Perusahaan Jasa. *PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 4(2), 3499–3505. <https://doi.org/10.56799/peshum.v4i2.8201>
- Sari, A., Wahyuni, A., Fakultas, M., & Dan Bisnis, E. (2023). Analisis Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua dan Kinerja SDM Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara). *Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja*, 7(2), 59–66. <https://online-journal.unja.ac.id/jaku>
- Satyareksa, Y. F. A. , & M. A. H. (2025). Prosedur Audit Atas Pendapatan Penjualan: Studi Kasus Pada Perusahaan Perkebunan Karet. *Jurnal Administrasi Bisnis Terapan*, Volume 7 Nomor 1. <https://doi.org/10.7454/jabt.v7i2.1128>
- Suryadi, Y., & Hartati, T. (2025). Implementasi Literasi Numerasi Melalui Metode STAR bagi Anak Berkebutuhan Khusus pada SLB (Sekolah Luar Biasa). *Jurnal Generasi CERIA Indonesia*, 3(1), 216–222. <https://doi.org/10.47709/geci.v3i1.6043>
- Tjandrakirana, R., Ermadiani, & Anton, I. B. (2021). *Pengantar Akuntansi 1 Dilengkapi Dengan Soal dan Pembahasan* (1st ed.).
- Zuhdi, R., Toyyib, M. T., & Faizah, Y. N. (2025). Accrual-Based Accounting In Public Health Center Blud: Enhancing Financial Transparency And Accountability. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 9(2), 210–227. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2025.v9.i2.7126>